

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Volume 3, Nomor 5, June 2025, P. 45-50

E-ISSN: 2986-6340

Licensed by CC BY-SA 4.0

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15541614>

Sinergi Kebijakan Ekonomi Makro dan Publik dalam Mendorong Peningkatan Hukum Ekonomi Syariah

Muhammad Nurfaidh Ramadhan¹, Yulfi Hari Ani², Neng Siti Karimah Fauziah³, Ahmad Fauzan⁴, Fakhziar Ramadhan⁵, Muhammad Rizqi Azis Mulkan⁶, Muhammad Zulkipli⁷, Dian Herdiana⁸

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

email: ¹mnramadhan1313@gmail.com ²harianiyulfi@gmail.com ³nenkarimahh@gmail.com
⁴fauzannazuaf924@gmail.com ⁵fakhziarramadhan4@gmail.com ⁶azizmulkan3@gmail.com
⁷mzulkipli2005@gmail.com ⁸dianherdiana@uinsgd.ac.id

Abstrak

Artikel ini mengkaji mengenai Mekanisme kolaborasi antara kebijakan-kebijakan sektor ekonomi publik dengan ekonomi makro dalam mengoptimalkan perekonomian negara dengan berbasis ekonomi syariah. Pemahaman yang baik terhadap aturan-aturan yang dimuat dalam kebijakan ekonomi mengakibatkan kepada ekonomi baik yang memiliki sifat progresif dan akurat sesuai dengan niat dan tujuan kebijakan tersebut disusun dan diterapkan. Syariah yang merupakan salahsatu komponen sandaran kehidupan bermasyarakat negara indonesia berperan penting dalam pembahasan ini sebagai objek sekaligus tujuan dari sinergi kebijakan ekonomi makro dan ekonomi publik itu sendiri. Sehingga hasil dari sinergi yang terjadi diharapkan dapat menjadi ujung tombak perekonomian negara yang adil, transparan, serta memenuhi kesejahteraan rakyatnya secara luas dinaungi dengan ketentuan-ketentuan syariah yang berprinsip teguh namun fleksibel penerapannya serta mendatangkan kemaslahatan untuk semua golongan masyarakat.

Kata kunci: Sinergi, Kebijakan Ekonomi Publik, Kebijakan Ekonomi Makro

Abstract

This article examines the collaboration mechanism between public economic sector policies and macroeconomics in optimizing the country's economy based on sharia economics. A good understanding of the rules contained in economic policy results in a good economy that has a progressive and accurate nature in accordance with the intention and objectives of the policy is prepared and implemented. Sharia, which is one of the components of the backbone of Indonesian society, plays an important role in this discussion as an object as well as a goal of the synergy of macroeconomic policies and the public economy itself. So that the results of the synergy that occurs are expected to be the spearhead of the country's economy that is fair, transparent, and fulfills the welfare of its people broadly shaded by sharia provisions that have firm principles but are flexible in their application and bring benefits to all groups of society.

Keywords: Synergy, Public Economic Policy, Macroeconomic Policy

Article Info

Received date: 10 May 2025

Revised date: 17 May 2025

Accepted date: 20 March 2025

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi global yang dinamis menuntut adanya adaptasi kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan, khususnya dalam konteks sistem ekonomi yang selaras dengan nilai-nilai keislaman. Ekonomi syari'ah, yang berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan, telah menjadi alternatif yang kian relevan dalam menjawab tantangan ekonomi kontemporer (Antonio 2011). Dalam kerangka tersebut, penguatan hukum ekonomi syari'ah menjadi kebutuhan strategis, tidak hanya sebagai instrumen legal formal, tetapi juga sebagai fondasi dalam pembentukan ekosistem ekonomi yang berkeadilan (Karim 2010). Sinergi antara kebijakan ekonomi makro dan ekonomi publik menjadi faktor kunci dalam mendukung penguatan hukum ekonomi syari'ah. Kebijakan ekonomi makro, seperti pengendalian inflasi, stabilitas fiskal, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, memberikan landasan struktural yang kuat (Mankiw 2021). Sementara itu, ekonomi publik berperan

dalam distribusi sumber daya dan penyediaan layanan publik secara adil dan efisien, yang selaras dengan prinsip *maqashid syari'ah* (Ascarya 2021).

Kebijakan ekonomi makro memiliki peran utama dalam menciptakan stabilitas dan mendorong aktivitas ekonomi nasional. Stabilitas inflasi, pengelolaan utang, suku bunga yang kompetitif, dan anggaran negara yang efisien adalah beberapa indikator keberhasilan dari dimensi makro ekonomi (Mankiw 2021). Namun, pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak serta merta berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan manusia, terlebih jika distribusi hasil pembangunan tidak merata atau jika pertumbuhan itu eksklusif dan eksploitatif (Piketty 2014). Di sisi lain, kebijakan publik sebagai perpanjangan tangan negara dalam mengelola isu sosial dan pembangunan masyarakat, memiliki potensi besar dalam menciptakan transformasi struktural menuju keberlanjutan. Kebijakan publik yang adaptif dan berorientasi pada inklusi sosial misalnya melalui pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, dan pembangunan infrastruktur dasar dapat memperkuat fondasi Hukum Ekonomi Syariah (Stiglitz, J. E., & Greenwald 2014). Namun kebijakan publik kerap menghadapi hambatan seperti koordinasi antar lembaga yang lemah, keterbatasan fiskal, dan inefisiensi birokrasi (Grindle 2004).

Uraian di atas membentuk pemahaman akan pentingnya mengkaji sinergi kebijakan ekonomi makro dan publik, tidak hanya sebagai bentuk implementasi program pemerintah dalam bidang ekonomi, tetapi juga sebagai upaya kolektif untuk memperkuat keberadaan dan efektivitas hukum ekonomi syariah di Indonesia. Sinergi tersebut tidak hanya bertujuan menciptakan stabilitas ekonomi dan pemerataan kesejahteraan, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai-nilai syariah yang menjunjung keadilan, keberlanjutan, dan kemaslahatan (Chapra 2008).

Berdasarkan hal tersebut, artikel ini bertujuan untuk menggambarkan secara lebih rinci bagaimana integrasi antara kebijakan ekonomi makro dan publik dapat berkontribusi terhadap penguatan hukum ekonomi syariah. Fokus pembahasan diarahkan pada faktor-faktor yang menjadi pendorong maupun penghambat dalam upaya integrasi kebijakan tersebut, sehingga dapat terlihat kompleksitas dan dinamika dalam mewujudkan sinergi kebijakan yang mendukung sistem ekonomi berbasis syariah (Ascarya 2021). Dengan demikian, diharapkan hasil kajian ini dapat menjadi masukan strategis bagi para pemangku kebijakan dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih harmonis dan selaras dengan prinsip-prinsip syariah di masa mendatang (Antonio 2011).

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang mana penggunaan pendekatan ini ditunjukkan guna menggali informasi yang relevan terkait topik sinergi kebijakan ekonomi makro dan publik dalam mendorong peningkatan hukum ekonomi syariah. Sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data sekunder yang mana data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari berbagai dokumen seperti buku, artikel jurnal, dokumen dan data relevan lainnya, termasuk penggunaan data yang bersumber dari internet yang merujuk pada laman web dari institusi kredibel atau dari pemberitaan yang akurat, sehingga sajian data dalam penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kondisi real yang ada di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Penerapan Kebijakan Ekonomi Makro dan Ekonomi Publik dalam Upaya Pengembangan Ekonomi Negara

Penerapan sistem perekonomian di Indonesia tidak bisa dilepaskan begitu saja dari aspek kebijakan dan hukumnya, sebagaimana diketahui bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum dengan UUD 1945 sebagai dasar hukumnya dan kebijakan-kebijakan lain sebagai pelengkap kekuatan hukumnya. Sistem Kebijakan Ekonomi Makro merujuk kepada pengertiannya memiliki 3 cabang yaitu kebijakan fiskal, kebijakan moneter, serta kebijakan struktural.

Penerapan kebijakan fiskal pada ekonomi makro didasari kepada permasalahan ekonomi negara salahsatunya dalam sektor perpajakan serta sektor pembelanjaan anggaran negara (Zakiyatul Miskiyah et al. 2022). kemudian dalam kebijakan moneter, terdapat usaha dalam memperbaiki sektor keuangan negara yang merupakan salahsatu aspek vital dalam perekonomian negara, yang mana di dalam sebuah kebijakan moneter terdapat sebuah tujuan yaitu dengan memberikan skema pengaturan sirkulasi keuangan dalam ekonomi sebuah negara (Purwanto 2017), hal ini tentu bertujuan untuk mengembalikan

stabilitas keuangan yang memiliki ketidakstabilan angka dan tingkat konversinya dalam pasar keuangan internasional, dalam hal ini tentu kebijakan moneter sangat memberikan kontribusi besar dalam menstabilkan keuangan negara dalam pasar ekonomi nasional bahkan internasional.

Adapun dalam kebijakan struktural lebih terfokus kepada peningkatan efektivitas kegiatan ekonomi dalam waktu yang lama, kebijakan ini juga dapat merevitalisasi tenaga kerja di pasar ekonomi, sektor bisnis, bahkan perdagangan mancanegara (Dwi 2023). Ketiga cabang ekonomi makro memiliki peran penting dalam meningkatkan kapabilitas negara dalam kegiatan perekonomiannya, terkhusus di negara kita yang memiliki aspek ekonomi yang berbasis syariah, maka dengan hadirnya inovasi syariah diharapkan dapat memberikan edukasi mengenai praktik ekonomi yang bersih serta tidak merugikan pihak atau pelaku ekonomi yang terkait.

Kebijakan ekonomi publik merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur dan mempengaruhi kegiatan ekonomi dalam upaya mencapai tujuan sosial dan ekonomi yang diinginkan, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Kebijakan ini mencakup berbagai aspek penting seperti pengelolaan pajak, pengeluaran pemerintah, serta regulasi yang bertujuan mengatasi kegagalan pasar dan menjamin alokasi sumber daya yang efisien. Dalam konteks ini, pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program publik, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. (Dr. Ridwan, SE & Ihsan Suciawan Nawir S.STP, 2021)

Selain itu, pengeluaran pemerintah diarahkan untuk subsidi sektor-sektor strategis dan program bantuan sosial kepada kelompok masyarakat kurang mampu agar tercipta pemerataan kesejahteraan. Regulasi juga memiliki peran vital dalam menentukan aturan-aturan yang menjaga keteraturan aktivitas ekonomi dan memastikan keadilan dalam distribusi sumber daya. Tujuan utama dari kebijakan ekonomi publik adalah menciptakan kondisi ekonomi yang stabil, efisien, dan berkeadilan, sekaligus memperbaiki kondisi yang tidak dapat ditangani oleh mekanisme pasar secara otomatis. Implementasi kebijakan ini melibatkan berbagai lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi demi memastikan efektivitasnya. Maka dari itu, kebijakan ekonomi publik menjadi alat strategis pemerintah untuk mengatasi tantangan sosial-ekonomi dan membangun fondasi yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (Bonaraja Purba, Desy Astrid Anindya et al., 2024)

Kebijakan ekonomi publik adalah kebijakan yang dibuat dan dijalankan oleh pemerintah untuk mengatur kegiatan ekonomi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Kebijakan ini mencakup berbagai tindakan seperti pengelolaan pajak, pengeluaran pemerintah, dan regulasi yang dirancang untuk memperbaiki kegagalan pasar dan menjamin pemerataan keuntungan ekonomi. (Mangkoesoebroto, 1994) Pembagian utama dalam kebijakan ekonomi publik meliputi tiga fungsi pokok berikut: (Bonaraja Purba, Desy Astrid Anindya et al., 2024):

Fungsi Alokasi

Fungsi ini bertujuan mengalokasikan sumber daya secara efisien untuk menyediakan barang dan jasa publik yang tidak dapat disediakan secara memadai oleh pasar. Contoh dari fungsi alokasi ini adalah pemerintah menyediakan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan yang bersifat publik dan akan menguntungkan masyarakat luas.

Fungsi Distribusi

Fungsi distribusi berkaitan dengan upaya pemerintah untuk mendistribusikan pendapatan dan kekayaan secara adil agar tidak terjadi kesenjangan sosial yang besar. Melalui kebijakan redistribusi, seperti pemberian subsidi, program bantuan sosial, dan sistem perpajakan progresif, pemerintah berupaya mengurangi ketimpangan ekonomi dalam masyarakat.

Fungsi Stabilisasi

Fungsi stabilisasi bertujuan menjaga kestabilan ekonomi makro dengan mengendalikan inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi agar tetap terkendali. Kebijakan fiskal dan moneter merupakan instrumen yang digunakan pemerintah untuk memastikan perekonomian stabil, terutama dalam menghadapi krisis ekonomi.

Urgensi syariah sebagai komplementer antara hasil sinergi kebijakan ekonomi makro dan ekonomi publik

Perekonomian saat ini lebih cenderung berorientasi kepada peningkatan pendapatan untung

yang sebesar-besarnya hingga pemerintah kurang aspek pemerataan dalam ekonomi itu sendiri, perlunya pemahaman dan penerapan pemerataan ekonomi disini bukan semata-mata menganut ajaran agama islam alias syariah saja, namun dari pemikiran konvensional pun pada tujuannya memiliki target dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Pemerataan ekonomi dapat diawali dengan eksplorasi dan distribusi sumber daya alam dengan baik dan terukur, edukasi masyarakat mengenai urgensi kebijakan ekonomi, hingga penerapannya melalui pemerataan pembangunan yang sangat memengaruhi pemerataan ekonomi tersebut (Rizkina et al. 2025). ekonomi syariah juga memiliki peran dalam menyelesaikan masalah-masalah perekonomian melalui ketentuan-ketentuan yang juga didasarkan kepada prinsip islam, ketentuan-ketentuan yang dimaksud tertata dalam Hukum Ekonomi Syariah yang kemudian dapat menjadi pelindung bagi segala bentuk praktik perekonomian di masyarakat secara luas (Afwadzi and Djalaluddin 2024). Maka dengan hal ini kesinambungan antara pemikiran syariah dan segala bentuk kebijakan ekonomi diharapkan dapat menjadi inovasi dan energi dalam optimalisasi perekonomian negara secara keseluruhan

Implementasi Kebijakan Ekonomi pada Lingkungan Masyarakat

Implementasi kebijakan ekonomi masyarakat Indonesia merupakan suatu proses yang kompleks dan melibatkan berbagai aspek yang saling terkait. Kebijakan ekonomi publik di Indonesia bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Dwi 2023). Dalam hal ini, terdapat beberapa komponen utama yang perlu diperhatikan, yaitu kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan perdagangan luar negeri, program pemberdayaan masyarakat, serta evaluasi dampak kebijakan.

Pertama, Kebijakan Fiskal, Kebijakan fiskal adalah instrumen utama yang digunakan pemerintah untuk mengatur perekonomian melalui pengelolaan penerimaan dan pengeluaran negara. Dalam konteks Indonesia, kebijakan fiskal mencakup pengaturan pajak dan pengeluaran pemerintah. Pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan proyek pembangunan. Pemerintah Indonesia menerapkan berbagai jenis pajak, seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak daerah. Pengeluaran pemerintah, di sisi lain, dapat bersifat ekspansif atau kontraktif. Dalam situasi resesi, pemerintah cenderung meningkatkan pengeluaran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Sebaliknya, dalam kondisi inflasi, pemerintah mungkin akan mengurangi pengeluaran atau meningkatkan pajak untuk menstabilkan harga. Kebijakan fiskal yang efektif dapat membantu mengurangi pengangguran, meningkatkan investasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kedua, Kebijakan moneter, Kebijakan Moneter yang dikelola oleh Bank Indonesia, berfokus pada pengaturan jumlah uang yang beredar dan suku bunga untuk mencapai stabilitas ekonomi. Salah satu instrumen utama dalam kebijakan moneter adalah suku bunga acuan, yang mempengaruhi biaya pinjaman dan tabungan. Dengan menyesuaikan suku bunga, Bank Indonesia dapat mendorong atau mengekang konsumsi dan investasi, yang pada gilirannya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Selain itu, operasi pasar terbuka juga digunakan untuk mengatur likuiditas di pasar uang. Bank Indonesia dapat membeli atau menjual surat berharga untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter yang efektif dapat membantu menjaga inflasi dalam batas yang wajar, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah (M. Nasution 2019).

Ketiga, Kebijakan perdagangan luar negeri, Kebijakan Perdagangan Luar Negeri di Indonesia bertujuan untuk mengatur transaksi perdagangan internasional dan melindungi industri domestik. Dalam konteks ini, pemerintah menerapkan berbagai kebijakan, seperti tarif impor, kuota, dan regulasi non-tarif. Kebijakan proteksi, seperti tarif impor, bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan barang impor yang lebih murah. Di sisi lain, kebijakan promosi ekspor mendorong peningkatan ekspor melalui insentif pajak dan fasilitas kredit bagi pelaku usaha. Kebijakan perdagangan luar negeri yang baik dapat membantu meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global, memperbaiki neraca perdagangan, dan menciptakan lapangan kerja. Namun, perlu diingat bahwa kebijakan ini harus seimbang agar tidak menghambat pertumbuhan sektor-sektor tertentu yang bergantung pada impor bahan baku.

Keempat, Program Pemberdayaan Masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah-daerah yang kurang berkembang. Program-program ini mencakup berbagai inisiatif, seperti Program Inpres Desa Tertinggal, yang fokus pada peningkatan infrastruktur dan layanan dasar di desa,

serta program kredit usaha kecil yang memberikan akses modal bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Pemberdayaan masyarakat juga melibatkan pelatihan keterampilan, pendidikan, dan akses terhadap informasi yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing. Dengan memberdayakan masyarakat, diharapkan mereka dapat berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian dan mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial.

Kelima, Evaluasi dampak kebijakan, Evaluasi Kebijakan merupakan langkah penting dalam proses implementasi kebijakan ekonomi. Melalui evaluasi, pemerintah dapat menilai efektivitas kebijakan yang diterapkan dan dampaknya terhadap masyarakat (Suryahadi and Sumarto 2003). Aspek-aspek yang dinilai meliputi pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, perubahan dalam tingkat pengangguran, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Metode evaluasi dapat mencakup survei, analisis data ekonomi, studi kasus, dan wawancara dengan masyarakat yang terdampak. Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian kebijakan yang lebih baik di masa depan. Dengan demikian, evaluasi dampak kebijakan menjadi kunci untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.

SIMPULAN

Proses implementasi ekonomi negara berorientasi kepada kebijakan-kebijakan ekonomi di dalamnya, ditinjau dari sudut pandang ekonomi konvensional tentu kebijakan akan lebih mudah diterapkan, namun saat menggunakan kacamata syariah, perlu diterapkan peninjauan lebih lanjut terkait kebijakan tersebut, bukan hanya semata-mata mengatur jalannya perekonomian saja namun juga syariah mengarahkan kebijakan ekonomi kepada kemaslahatan umat dan kepentingan universal tanpa ada unsur merugikan antara satu pihak ekonomi dengan pihak lainnya, maka dari itu perlu adanya optimalisasi penerapan kebijakan ekonomi publik secara umum, salahsatunya adalah dengan lebih memperhatikan kembali teknis penerapan ekonomi makro serta menerapkan pemikiran syariah guna meningkatkan kualitas ekonomi negara dan diikuti dengan perkembangan unsur-unsurnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dosen pengampu mata kuliah Kebijakan Ekonomi Publik pada Semester Genap Tahun Pembelajaran 2024/2025 yang telah memberi dukungan material terhadap penyusunan artikel ini, serta kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dari awal sampai dengan akhir penyusunan artikel sesuai dengan rencana. Juga tidak lupa kami ucapkan kepada bapak dosen pengampu mata kuliah Kebijakan Ekonomi Publik Bapak Dr. Dian Herdiana, S.IP. M.Ap yang telah membimbing kami dalam penyusunan artikel jurnal ini dengan dedikasi terbaik hingga kami dapat menuntaskannya.

REFERENSI

- Afwadzi, Benny, and Ahmad Djalaluddin. 2024. "Pengembangan Ekonomi Berbasis Syariah Di Era Digital: Antara Peluang, Tantangan, Dan Kendala." *Journal of Sharia Economics* 5 (1): 70–86. <https://doi.org/10.22373/jose.v5i1.3966>.
- Antonio, M.S. 2011. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya. 2021. *Ekonomi Syariah Dalam Dinamika Kebijakan Makroekonomi Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia Institute.
- Chapra, M. U. 2008. "The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid Al-Shariah. London: International Institute of Islamic Thought."
- Dwi, Anugrah. 2023. "Kebijakan Ekonomi Pemerintah." Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU. 2023.
- Grindle, M. S. 2004. *Good Enough Governance: Poverty Reduction and Reform in Developing Countries Governance*. 17(4).
- Karim, A.A. 2010. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- M.Nasution. 2019. "Evaluating the Effectiveness of Fiscal Policy in Indonesia." *Journal of Indonesian Economy and Business* 34(1): 1–15.
- Mankiw, N. G. 2021. *Principles of Economics (9th Ed.)*. Cengage Learning.
- Piketty, T. 2014. *Capital in the Twenty-First Century*. Harvard University Press.

- Purwanto, Hery. 2017. "Kebijakan Pengendalian Moneter Di Indonesia Dalam Perspektif Perbankan Syari'ah." *Syariati : Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 3 (01): 103–18.
- Rizkina, Anggi, Sari Siregar, Namira Hamni Lubis, and Fadhilla Isfa. 2025. "Pentingnya Pemerataan Pembangunan Ekonomi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia" 5.
- Stiglitz, J. E., & Greenwald, B. 2014. *Creating a Learning Society: A New Approach to Growth, Development, and Social Progress*. Columbia University Press.
- Suryahadi, S &, and A Sumarto. 2003. "The Impact of Economic Growth on Poverty Reduction in Indonesia." *Buletin of Indonesian Economic Studies*.
- Zakiyatul Miskiyah, Arif Zunaidi, Sodik Almustofa, and Mahrus Suhardi. 2022. "Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam." *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah* 6 (1): 69